

## Sutan Sjahrir: Manusia dan Noktah Sejarahnya di Timur Tengah

**Herdi Sahrasad**

Associate professor in Universitas Paramadina, Indonesia

### Abstract

*This treatise opens with a small question: Why Sutan Sjahrir married Poppy Saleh Mangundiningrat in Cairo, Egypt in the 1950s and did not in Jakarta? Poppy was studying at the London School, England and Sjahrir in Jakarta, the two then flew to Cairo and married there, witnessed by Soedjatmoko, a child of revolution, which is also a leading intelligentsia and political cadre of Sjahrir. Apparently, the First Prime Minister of the Republic of Indonesia, Sutan Sjahrir had a speck of history in the Middle East during the war of independence 1945-1949, which makes its way to Egypt to meet with the Arab leaders, fighters, intellectuals, activists and warriors. Sjahrir even met Hassan al-Bana, founder of the Muslim Brotherhood persistent against colonialism and imperialism in the Muslim world, especially the Middle East. Sjahrir asked the Arab world to mobilize supports for the independence of Indonesia. Sjahrir known as the Socialists that grow from the Minangkabau world and the Western-educated to find a foothold in the Middle East struggle to carry out a diplomatic mission of the President Soekarno and Vice President M. Hatta, for the people of Indonesia. We should remember and recall, Sjarir as a hero, even though he is almost forgotten by this nation.*

### Keywords

Sjahrir; Timur Tengah; Islam; Hasan Al-Bana; Ikhwanul Muslimin



### I. Pendahuluan

Suatu ketika pada kurun 1998 menjelang Orde Baru Presiden Soeharto jatuh, sang inteligensia sosial-demokrat dan mantan aktivis ITB yang jadi tahanan politik era Orde Baru selama 3 tahun, M. Fadjroel Rachman, yang oleh almarhum Soebadio Sastrosatomo, tokoh PSI (Partai Sosialis Indonesia) - - dijuluki sebagai "Sjahrir muda", pernah bertanya kepada saya: Mengapa pernikahan mantan Perdana Menteri Sutan Sjahrir dengan Siti Wahyunah Saleh Mangundiningrat (Ibu Poppy Sjahrir) tahun 1950-an dilangsungkan di hadapan Mufti Al Azhar, Mesir? Adakah noktah sejarah yang melatari pernikahannya di Kairo, jantung Timur Tengah kala itu?

Sebagai seorang peneliti sejarah, politik dan ekonomi di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, penulis berusaha menjawab pertanyaannya, dengan melacak jejak perjuangan dan diplomasi "perjuangan" Sutan Sjahrir di Timur Tengah. Tulisan ini saya harapkan bisa menjawab, setidaknya untuk sebagian, keingintahuan M. Fadjroel Rachman dan (mungkin orang lain) mengenai hal itu, dengan segala keterbatasan interpretasi dan sumber informasi yang ada.

Sjahrir atau Bung Kecil adalah misteri bagi banyak orang, termasuk saya yang baru mengenal namanya ketika masuk SMP dalam usia remaja. Kelak ketika saya menjadi aktivis muda HMI, Soedjatmoko (mantan Rektor Universitas PBB dan mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat) dalam diskusi dengan para aktivis di rumahnya, Jalan Tanjung Jakarta kurun 1980-an, dimana saya terlibat di dalamnya, sesekali menceritakan bagaimana kekuatan pemikiran Sjahrir, kiprah dan sepak terjangnya sebagai aktivis pergerakan nasional. Indonesianis Cornell University, AS, Benedict Anderson sering menyebut Soedjatmoko adalah kader Sjahrir dan sangat dipengaruhi Sjahrir, sang mentor politiknya.<sup>1</sup>

Namun demikian, bagi banyak anak muda seusia saya waktu itu dan sampai kini, Sjahrir tetaplah sebuah misteri: Ia seorang nasionalis anti-kolonial dengan visi sosialis demokrat yang berjuang keras di masa mudanya, mengalami penjara kolonial dan pasca kolonial, senang bermain dengan bocah-bocah kecil, bertemu dengan pemimpin besar India Jawaharlal Nehru sampai pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Bana, berpolitik dengan pikiran dan nuraninya, meski nyaris selalu dikalahkan dan dilupakan.<sup>2</sup>

Berdasarkan sumber-sumber sejarah, pada 21 Juli 1947, tepat di bulan suci Ramadhan di mana Kaum Muslim sedang menunaikan ibadah puasa di Republik Indonesia (RI) yang sudah memenuhi syarat wujud internasionalnya, dengan pengakuan negara-negara Arab akan kemerdekaan dan kedaulatannya, Belanda melancarkan aksi militer pertama terhadap Republik yang baru lahir ini. Belanda bergerak menghancurkan negara yang telah mendapat pengakuan internasional itu, dengan segala cara.

Para sejarawan menyingkapkan bahwa perselisihan pendapat akibat perbedaan penafsiran dalam melaksanakan Perjanjian Linggarjati menimbulkan konflik antara Indonesia dan Belanda. Perundingan Linggarjati adalah hasil diplomasi berliku yang diusahakan Sjahrir. Setelah Proklamasi, situasi Indonesia sangat genting. Belanda datang kembali membonceng Sekutu. Mereka mendarat di Tanjung Priok pada 29 September 1945.

Dengan arogansi Barat dan mental kolonialis yang mengakar, para pejabat NICA (Netherlands Indies Civil Administration) berpikir bisa berkuasa kembali di Indonesia dengan menangkap dwitunggal Soekarno-Hatta. Kedua pemimpin ini dituding dan dianggap Belanda telah berkolaborasi dengan Jepang. NICA bermaksud mengambil alih semua departemen dari tangan Jepang. Bagi republik yang baru lahir, di sini peran Sutan Sjahrir cukup nyata untuk mengesampingkan tuduhan kolaborasi yang membahayakan Indonesia di mata dunia itu dan mengamankan jalannya kemerdekaan dengan diplomasi di fora internasional.

Pertempuran besar meletus di berbagai kota, menghadang Belanda yang bersembunyi di balik Sekutu. Semarang digun-cang perang lima hari, 14-19 Oktober 1945. Sehari kemudian, Jenderal Sudirman dan Tentara Keamanan Rakyat bergelimang darah menahan laju tentara Sekutu di Ambarawa. Tak berapa lama, Surabaya membara pada 10 November. Perang hadir di depan mata, dan Indonesia terancam kalah. "Adalah Sjahrir yang bisa membalik semua keadaan itu dalam waktu cepat," demikian kesaksian Rushdy Hoesein, pengamat sejarah dan peneliti Linggarjati. "Sjahrir pasang badan," ungkap Rushdy Hussein.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat, John D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*, terj. Hasan Basari (Jakarta: Grafitipers, 1993). Dalam percakapan di kampus Cornell, Ithaca, Oktober 1994, Profesor Ben Anderson bersikap sangat kritis kepada kalangan PSI yang dinilainya kebarat-baratan (ke-Belanda-Belandaan) dan elitis. Nampaknya almarhum Prof Ben Anderson secara pribadi tidak menyukai kalangan PSI, dan tentunya itu sah-sah saja.

<sup>2</sup>Tentang riwayat Sjahrir, visi-misi, pemikiran dan perjuangannya, baca, Rudolf Mrazek, *Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1994).

<sup>3</sup> Lihat, A.B Lopian & P.J Droglever, *Menelusuri Jalur Linggarjati* (Jakarta: PT Temprint, 1992); Ide Anak Agung Gde Agung, *Persetujuan Renville- Prolog dan Epilog* (Solo: Yayasan Pustaka Nusatama, 1995); dan Laporan Tempo, "Linggarjati, Sebuah Jalan," Tempo, 09 Maret 2009.

Pada 14 November 1945, sistem presidensial diubah menjadi sistem parlementer. Sjahrir diangkat sebagai perdana menteri pertama. Inggris mengajak berunding. Pada 23 November, kabinet Sjahrir menjawab dengan maklumat, Indonesia tak sudi berunding selama Belanda berpendirian masih berdaulat di Indonesia.

Belanda lalu memblokir Jawa dan Madura. Tapi Sjahrir melakukan diplomasi cerdas. Meskipun dilanda kekurangan pangan, Sjahrir memberikan bantuan beras ke India pada Agustus 1946. Tindakan Sjahrir ini membuka mata dunia. Sebelum-nya, pada 1 Februari 1946, ia nyaris berhasil “memaksa” utusan Inggris, diplomat senior Sir Archibald Clark-Kerr, berbicara dengan Soekarno. Sayangnya, Soekarno, yang sudah berada di Yogyakarta, menolak datang ke Jakarta.<sup>4</sup>

Seperti bermain catur, sedikit demi sedikit Sjahrir terus mencoba menekan pemerintah Belanda melalui diplomasi. Ia terus-menerus mengupayakan agar Indonesia dan Belanda duduk di meja perundingan. Kesempatan pertama datang dalam perundingan di Hoge Veluwe, Belanda, 14-16 April 1946.

Ketika itu Indonesia mengajukan tiga usul: pengakuan atas Republik Indonesia sebagai pengembalian kekuasaan di seluruh bekas Hindia Belanda, pengakuan *de facto* atas Jawa dan Madura, serta kerja sama atas dasar persamaan derajat antara Indonesia dan Belanda. Namun usul itu ditolak Belanda.

Peluang berunding dengan Belanda terbuka lagi ketika Inggris mengangkat Lord Killearn sebagai utusan istimewa Inggris di Asia Tenggara, sekaligus penengah konflik Indonesia-Belanda. Konsulat Inggris di Jakarta mengumumkan, selambat-lambatnya pada 30 November 1946 tentara Inggris akan meninggalkan Indonesia.

Kabinet baru Belanda kemudian mengutus Schermerhorn sebagai Komisi Jenderal untuk berunding dengan Indonesia. Schermerhorn dibantu tiga anggota: Van Der Poll, De Boer, dan Letnan Gubernur Jenderal H.J. Van Mook. Perundingan itulah yang kemudian terjadi di Linggarjati. Lokasi itu diusulkan oleh Maria Ulfah Santoso (Menteri Sosial), yang dekat dengan Sjahrir. Ayah Maria pernah menjadi regent (bupati) Kuningan. Kebe-tulan, Residen Cirebon, Hamdani, dan Bupati Cirebon, Makmun Sumadipradja, juga sahabat Sjahrir. Delegasi Belanda mulanya mengkhawatirkan keamanan. Namun Sjahrir berhasil meyakinkan kemampuannya mengontrol wilayah tersebut.<sup>5</sup>

Sjahrir, sebagai bekas aktivis gerakan sosialis di Belanda, ternyata telah mengenal Schermerhorn, yang berasal dari Partai Buruh. Meski demikian, sebagaimana diduga, perundingan berlangsung alot. Dari 17 pasal yang dibahas, deadlock terjadi pada pasal mengenai pembentukan Negara Indonesia Serikat. Pasal ini disetujui setelah Schermerhorn, tanpa diikuti Sjahrir yang kelelahan, mengunjungi Presiden Soekarno yang menginap di Kuningan. Soekarno langsung menyetujui ketika diberi tahu bahwa Negara Indonesia Serikat berdaulat di bawah Kerajaan Belanda.

Sjahrir terkejut akan sikap Soekarno, namun tak bisa menolak ketika persetujuan itu disampaikan oleh Schermerhorn. Bagi Sjahrir, itu artinya Belanda hanya mengakui Republik secara *de facto*. Sjahrir kemudian memasukkan pasal tambahan tentang arbitrase. Bila ada perselisihan menyangkut perjanjian tersebut, akan diajukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Pasal ini terbukti menjadi penyelamat ketika terjadi agresi Belanda ke wilayah Republik,” ungkap sejarawan Rusdi Hussein<sup>6</sup>.

Dengan pasal Perjanjian Linggarjati itu kelak Sjahrir berpidato di Markas PBB, di Lake Success, New York untuk membela republik dan memperlakukan Belanda yang ingin menjajah Indonesia lagi.

---

<sup>4</sup> Lihat, A.B Lapian & P.J Droglever, Menelusuri Jalur Linggarjati

<sup>5</sup> Lihat, Ide Anak Agung Gde Agung, Persetujuan Renville- Prolog dan Epilog.

<sup>6</sup> Lihat, A.B Lapian & P.J Droglever, Menelusuri Jalur Linggarjati

Segera setelah persetujuan diparaf pada 14 November 1946, kedua delegasi membawa rencana persetujuan itu ke masing-masing parlemen untuk disahkan. Republik Indonesia menge-sahkan Perjanjian Linggarjati di Malang, Jawa Timur, dalam rapat Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), 25 Maret 1947.

Di Belanda, pengesahan perjanjian mendapat hujan kritik peme-rintah dan parlemen. Schermerhorn tersingkir dari panggung politik.

Karena tak puas dengan penyelesaian Linggarjati, pada 20 Juni 1947 Belanda melancarkan aksi militer pertama dengan men-duduki kota-kota penting Republik.

Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengeluarkan nota berupa ultimatum yang harus dijawab pemerintah Indonesia dalam waktu 14 hari, karena tidak mencapai kesepakatan terhadap nota tersebut, maka pada tanggal 20 Juli 1947, tengah Malam Belanda melancarkan serangan ke seluruh daerah Republik Indonesia. Operasi yang di beri label “aksi polisional“ ini meru-pakan agresi yang dikenal dengan Agresi Militer I. Pasukan-pasukan belanda bergerak ke Jakarta dan Bandung untuk menguasai Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menguasai Madura dan wilayah Jawa Timur, serta satu pasukan lagi untuk menduduki Semarang. Surabaya menjadi arena pertempuran yang paling hebat sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Agresi kolonial pada tanggal 20 Juli 1947 ini menjadi fakta sejarah bahwa Belanda melancarkan aksi polisional atau Agresi Militernya yang pertama ke Indonesia untuk menguasai kembali wilayah ini. Dalam serangan ini, Sjahrir bisa lolos ke luar negeri, dan melancarkan diplomasinya yang historis bagi kelangsungan RI ke depan.<sup>7</sup>

Dalam agresi Belanda ini, di Sumatera pasukan Belanda berus-aha menguasai perkebunan-perkebunan di sekitar Medan. Instalasi minyak dan batubara di Palembang dan sekitarnya juga diserang dan dikuasai. Pasukan TNI memutuskan mundur ke pedalaman sambil menjalankan taktik bumi hangus dan taktik gerilya. Sistem wehrkreise diterapkan dengan menggan-tikan sistem pertahanan liner.

Dengan taktik itu, Belanda hanya mampu bergerak di kota-kota dan jalan raya. Sementara wilayah lainnya dikuasai sepenuh-nya oleh TNI. Walaupun dengan kemampuan teknik sangat terbatas, TNI Angkatan Udara mulai berperan aktif dalam perang melawan Belanda. Dengan bermodalkan pesawat tua peninggalan Jepang, yang terdiri dari sebuah pesawat penge-bom Guntai dan dua buah pesawat pemburu Cureng, dan penerbangan AURI terlibat dalam beberapa serangan udara terhadap Belanda. Pada tanggal 29 Juli 1947, ketiga pesawat yang berpangkalan di Maguwo Yogyakarta ini terlibat pertem-puran di Ambarawa, Salatiga dan Semarang.

Aksi “Operatie Product“ atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian dari Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pan-dang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggajati.<sup>8</sup>

Tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum agar supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km. dari garis demarkasi. Dan dengan tegas, para pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini.<sup>9</sup>

Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai Aksi Polisionil, dan

---

<sup>7</sup> Tentang agresi Belanda dan pergolakan awal kemerdekaan ini, lihat, M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200—2004* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 428-468.

<sup>8</sup>Baca, M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200—2004*

<sup>9</sup>Laporan sebagaimana dikutip Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Agresi\\_Militer\\_Belanda\\_I](https://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda_I)

menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Dr. H.J. van Mook menyampaikan pidato radio di mana dia menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Linggajati. Pada saat itu jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang, dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia.

Konferensi pers pada malam 20 Juli 1947 di istana, di mana Gubernur Jenderal HJ Van Mook mengumumkan pada warta-wan tentang dimulainya Aksi Polisionil Belanda pertama.

Serangan di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam, sehingga dalam bukunya, J. A. Moor menulis agresi militer Belanda I dimulai tanggal 20 Juli 1947. Belanda berhasil mene-robos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.

Laporan sejarah menyingkapkan, pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Troepen (KST) di bawah Westerling yang kini berpangkat Kapten, dan Pasukan Para I (le para compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar. Pasukan KST (pengembangan dari DST) yang sejak kembali dari pembantaian di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera.

Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wila-yah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan dan pertambangan.

Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol Palang Merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisutjipto, Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh dan Perwira Muda Udara I Adisumarmo Wiryokusumo.

Akibat agresi militer pertama Belanda pada 21 Juli 1947, kedu-dukan Indonesia semakin terjepit. Pasukan Belanda telah me-nguasai separuh Jawa. Posisi ibu kota di Yogyakarta pun terancam.

Melihat kondisi yang kritis ini, Bung Karno mengeluarkan surat penunjukan duta besar keliling kepada Sutan Sjahrir. Sjahrir, yang baru saja mengundurkan diri dari posisi perdana menteri, segera bertindak. Ia menembus blokade Belanda menuju India. Nehru, sahabat lama Sjahrir, dengan antusias memberikan dukungan kepada Indonesia. Dari India Sjahrir bertolak ke Kairo, Mesir, hanya dengan sepotong baju dan celana yang menempel pada tubuhnya.

Sementara itu, kabar serangan Belanda yang massif ke Indo-nesia itu menyebar ke Timur Tengah, di mana para inteligensia dan mahasiswa Islam Indonesia di kawasan ini sudah bergerak melakukan diplomasi revolusi dan perjuangan, menyampaikan permintaan dukungan Mesir dan Dunia Arab bagi kemerdekaan RI. Bagi mereka yang mengikuti perkembangan situasi di Indonesia, kejadian ini tidak begitu mengejutkan. Tapi bagi kalangan pergerakan di Timur Tengah yang beragama Islam dan yang selalu mengingat praktek-praktek kaum kolonial di daerah itu, serangan Belanda ke Republik Indonesia itu mem-bangkitkan kemarahan dan kegeraman atas aksi Belanda ter-sebut. Apalagi dua hari sebelum kejahatan kolonial itu, Peme-rintah Belanda telah mengumumkan di parlemennya bahwa: "Belanda tidak dapat menangguhkan lagi keputusan yang harus diambilnya mengenai

Indonesia dan pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia tidak mungkin lagi dalam kea-daan sekarang.”<sup>10</sup>

Sesungguhnya ketika Belanda memulai kejahatan politiknya atas Indonesia itu, Pemerintah Mesir, Perwakilan-perwakilan Arab dan Islam di Kairo dan Sekjen Liga Arab, A.R. Azzam Pasya yang berada di New York juga sedang menghadapi soal-soal konflik Mesir - Inggris dan soal Palestina.

Bersamaan dengan serangan Belanda ke Indonesia itu, diberi-takan bahwa mantan Perdana Menteri pertama RI Sutan Sjahrir pada bulan Agustus 1947 berhasil meloloskan diri dari kepung-an Belanda dan telah memasuki Singapura, untuk kemudian ke India dan menuju Kairo sebelum bertolak ke New York meng-hadiri sidang umum Dewan Keamanan PBB.

Di tengah-tengah suasana suram itu, berita kelolosan Sutan Sjahrir banyak memberi harapan bagi perjuangan yang harus lebih digiatkan lagi di lapangan internasional melalui diplo-masi. Karena waktu itu nama Sjahrir sudah dikenal luas di lapangan tersebut, terutama di Amerika Serikat sebagai pemim-pin antifasisme yang berwibawa dalam menentang penduduk-an Jepang di Indonesia.

## II. Kajian Pustaka

### **Sjahrir, Hasan Al-Bana dan Liga Arab**

Sutan Sjahrir atau Bung Kecil yang telah berhasil meloloskan diri dari kepungan Belanda pada permulaan agresi Belanda di Indonesia itu, telah sampai di Kairo pada jam 1.30 pagi, tanggal 5/8/1947, dalam perjalanan ke New York. Ketika sampai di Kairo, Sjahrir hanya mengenakan selemba kemeja dan penta-lon, satu-satunya pakaian lusuh yang ia pakai sejak meloloskan diri dari kepungan Belanda di Indonesia. Para aktivis Ikhwanul Muslimin melihat wajahnya yang innocent dan kelelahan tak mengubah semangatnya yang luar biasa untuk membela Tanah Airnya. Sjahrir mudah mendapat dukungan di Kairo karena peran Haji Agus Salim yang sebelumnya sudah menjalankan “diplomasi perjuangan” di Timur Tengah sebagai seorang nasionalis yang memiliki basis kuat “religius-kultural” guna mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.<sup>11</sup>

Di lapangan terbang Sjahrir disambut oleh Haji Agus Salim dan warga Indonesia yang terlebih dulu berada di Kairo, juga oleh Wakil Kementerian Luar Negeri Mesir, para tokoh agama dan - pemimpin partai politik dan organisasi-organisasi rakyat Mesir seperti Ikhwanul Muslimin dan para tokoh dan pemim-pin negara-negara Arab, serta puluhan wartawan setempat dan asing. Hasan Al-Bana, tokoh Ikhwanul Muslimin begitu antusias mengerahkan dukungan dan menyambut Sjahrir, seorang nasionalis Indonesia sekaligus pemimpin Sosialis dari republik yang baru lahir ini. Al-Bana dan Ikhwanul Muslimin waktu itu telah menyerukan agar masyarakat dan negara-negara di Dunia Arab, mendukung kemerdekaan Indonesia dan memerangi kolonialisme Barat yang menjajah Dunia Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Untuk selengkapnya, baca Zein Hassan, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980). Saya juga sangat berterimakasih kepada almarhum M. Zein Hassan dan perpustakaan Dewan Dahwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jakarta, yang membantu saya meng-gunakan sumber bacaan, dokumen dan literturnya.

<sup>11</sup> Lihat, Erni Haryanti Kahfi, *Islam and Nationalism: Agus Salim and Nationalist Movement in Indonesia During the Twentieth Century* (Jakarta: Logos, 2001); dan juga, Abdurrahman, “Peranan Agus Salim Menjelang dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia (1942-1954),” paper, Program Pasacasarjana pada jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada.

<sup>12</sup> Menyusul kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, sekitar dua tahun sebelum kedatangan Sjahrir, pada tahun 16 Oktober 1945 di Gedung Jami’ah Sjubban Muslimin Kairo (Pusat Perhimpunan Pemuda Islam) berkumpul wakil organisasi sosial dan politik Mesir. Perkumpulan itu mendirikan Lajnatud Difa’i ’an Indonesia (Komite Pembela Indonesia), sebuah organisasi yang menghimpun dukungan rakyat Mesir bagi kemerdekaan

Peristiwa pertemuan Hasan Al-Bana (1905-1949), pendiri Ikhwanul Muslimin, dengan Sutan Sjahrir dan H. Agus Salim ketika kedua Founding Fathers itu berkunjung ke Mesir, merupakan momentum historis. Itulah persinggungan pertama Ikhwanul Muslimin dengan Indonesia.<sup>13</sup>

Kepada kaum pergerakan Arab dan wartawan datang menge-rumuninya di Kairo, Sjahrir menyatakan: “Keberangkatan saya ke New York adalah atas penunjukan resmi Presiden Republik Indonesia, Soekarno.”

Atas pertanyaan para wartawan Arab ‘apakah Indonesia negara yang berdaulat?’, dijawab oleh Sjahrir: “Persetujuan Dewan Keamanan PBB memasukkan soal Indonesia dalam acaranya, hal itu sudah merupakan pengakuan yang tegas bahwa Indo-nesia mempunyai kedaulatan penuh.”

Mengenai soal Indonesia itu sendiri, Sjahrir menyatakan: “ Soal Indonesia seluruhnya harus dimajukan ke pengadilan inter-nasional, setelah kami melaksanakan perintah gencatan senjata yang dikeluarkan DK-PBB, dan setelah saran-saran India dan Australia mengenai persengketaan itu disampaikan kepada sidang umum PBB. Karena gencatan senjata saja hanya akan menguntungkan Belanda, apabila mereka dibiarkan bercokol di daerah-daerah yang mereka duduki.”<sup>14</sup>

Ketika ditanya wartawan Mesir dan Arab apakah Indonesia akan memasuki Liga Arab, dijawab Sjahrir dengan tersenyum : “Tidak mungkin, karena Indonesia bukan negara Arab. Tetapi, sebagai negara Islam, adalah penting bagi Indonesia untuk bekerjasama yang erat dengan negara-negara Arab dan Islam tersebut.”

Sjahrir mengucapkan terima kasih kepada para tokoh dan pemimpin dunia Arab dan Islam yang telah menyokong Indo-nesia, terutama Mesir yang telah memelopori sokongan itu. Tak lama kemudian Haji Agus Salim menyela dengan menga-takan bahwa pihaknya meminta Bung Sjahrir singgah di Kairo sehari-dua hari untuk menemui pemimpin-pemimpin Mesir dan Arab, dan jika diberi kesempatan diharapkan akan ber-audensi dengan Raja Faruk, kepala negara Mesir.

Selama sehari semalam 5 Agustus 1947 di Kairo, Sjahrir telah menemui Ibrahim Abdul Hadi Pasya, Kepala Kabinet Raja. Selain menyampaikan terima kasih Indonesia kepada Raja Faruk, juga menerangkan perkembangan situasi politik dan militer di Indonesia. Kemudian Sjahrir mengunjungi Kemen-terian Luar Negeri dan menjumpai Sekjennya Kamil Abdulrahim Bey dan Ibrahim Basuki Ibazah, Menlu ad interim-nya.

---

Indonesia. Salah satu anggota Komite Pembela Indonesia adalah Taufik Syawi, ulama dan cendekiawan dari Ikhwanul Muslimin. Sebagai organisasi yang salah satu tujuannya adalah melawan kolonialisme barat, Ikhwan sangat menaruh perhatian pada Indonesia, yang mereka dengar sebagai negeri Muslim terbesar yang baru merdeka dan muncul ke permukaan arena dunia.(Majalah Tempo, 30 September 2001).

Pada 1947, Agus Salim melawat ke Mesir sebagai ketua Misi Republik Indo-nesia ke Timur Tengah. Misi itu berangkat melalui Bombay di mana beliau dan anggota misi dijamu makan siang oleh Sayeed Abdul Munim Zawawi, seorang hartawan Arab dari Oman yang simpatik dan menyokong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Misi berangkat bersama-sama dengan konsul Jenderal Mesir di Bombay, Mohammad Abdul Munim. Mereka sampai di Mesir tanggal 19 April 1947. Misi diplomatik RI yang dipimpin H. Agus Salim ke beberapa negara Arab, beranggotakan juga Muhammad Rasyidi, Nazir Pamuntjak, Abdul Kadir dan A.R. Baswedan. Akibat usaha ini negara-negara Islam mengakui Republik Indonesia secara de jure. Pada tanggal 10 Juni 1947, Haji Agus Salim menandatangani persahabatan antara Republik Indonesia dan Mesir di Kairo. Sedangkan dari pihak Mesir ditandatangani oleh M.F. Nokrasyi sebagai wakil dari pemerintahan Mesir.

Pada waktu dibentuk kabinet baru pada tanggal 3 Juli 1947 oleh PM Amir Sjarifuddin, Haji Agus Salim ditunjuk sebagai menteri luar negeri. Sementara Amir Sjarifuddin melaksanakan tugasnya di dalam negeri, Haji Agus Salim men-jalankan tugasnya ke Suriah, Irak dan Lebanon.

<sup>13</sup>Majalah Tempo, 30 September 2001, h. 82

<sup>14</sup> M. Zein Hassan, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980).



Pertemuan yang berlangsung satu setengah jam itu telah memberi kesempatan bagi Bung Sjahrir untuk membentangkan persoalan konflik Indonesia-Belanda dengan seluas-luasnya. Karena hari itu bersamaan dengan 18 Ramadhan 1366, Bung Sjahrir bersama para anggota Missi Tetap R.I. pada sorenya berbuka puasa di Muhammad Ali Club atas undangan Menlu ad interim Mesir itu, beserta para Kepala Perwakilan Arab di Kairo, para tokoh pergerakan Mesir seperti Hassan Al Banna (Ketua Ikhwanul Muslimin), tokoh agama dan pejabat Mesir dan Arab lainnya. Jamuan buka puasa itu menjadi tempat yang sebaik-baiknya bagi pihak Indonesia membentangkan lagi persoalan Indonesia kepada pihak Arab yang lengkap diwakili itu, serta menyampaikan terima-kasih kepada dunia Arab yang telah menunjukkan perhatian dan persahabatannya itu. Sjahrir juga mengadakan pertemuan khusus dengan Hassan Al-Bana dan para tokoh dan aktivis Ikhwanul Muslimin lainnya di markas organisasi Islam ini di Mesir.

Hassan Al-Bana menyatakan pihaknya siap menggalang dukungan kaum pergerakan di Mesir dan Timur Tengah bagi perjuangan Indonesia di bawah Soekarno-Hatta-Sjahrir, demi mempertahankan kemerdekaan. Sjahrir membalas, Indonesia meminta dukungan Mesir dan negara-negara Arab bagi perjuangan dan menyampaikan rasa terima kasihnya yang dalam. Al-Bana ketika itu memimpin Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslim atau Muslim Brotherhood), yang merupakan organisasi Islam yang sangat tegas mendesak pemerintah Mesir dan Liga Arab agar mendukung sepenuhnya kemerdekaan Indonesia. Ikhwanul Muslimin di bawah pimpinan Al-Bana juga sangat keras menentang serangan Belanda ke Indonesia, yang dalam persepsinya merupakan simbol kembalinya kolonialisme Eropa (Barat) di Dunia Islam.

Melalui Sjahrir dan tim delegasi RI itu, Republik Indonesia secara resmi mengadakan agresi militer Belanda ke Dewan Keamanan PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Persetujuan Linggajati.

### III. Pembahasan

#### **Sjahrir, Diplomasi Islam dan Ikhwanul Muslimin**

Semangat ukhuwah Islamiyah yang digunakan oleh Sjahrir mau-pun Haji Agus Salim dan para aktivis kemerdekaan RI di Mesir dan Timur Tengah menjadi magnet yang memancarkan magnitud simpati negara-negara Islam umumnya dan negara-negara Arab khususnya.

Berita harian Ikhwanul Muslimin dan statemen para pemimpin Mesir dan Arab sepanjang bulan Oktober 1947, menyatakan bahwa ungkapan persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) dari-seorang negarawan sosialis seperti Sjahrir, Pemimpin Sosialis (Partai Sosialis Indonesia), adalah sangat menarik perhatian dengan pengakuannya yang tegas bahwa perjuangan Indonesia di luar negeri hanya dapat dimenangkan dengan pengakuan penuh negara-negara Islam sebelum RI cukup berumur dua tahun itu.

Pernyataan Sjahrir kepada harian Ikhwanul Muslimin (edisi 5/10/1947, alih bahasa Zein Hassan)<sup>15</sup> amat meneguhkan hal itu: "Saya percaya bahwa sokongan Dunia Arab terhadap Indonesia mengandung arti lebih dari semata-mata persaudaraan. Gerakan ini membayangkan suatu kekuatan yang akan membawa kepada persatuan bulat antara Dunia Islam seluruhnya."

Bagi Sjahrir yang sangat paham aspirasi dan jiwa masyarakat Dunia Islam, ia melihat suatu kenyataan adanya kecenderungan yang berkembang dalam Ummat Islam di Dunia ke

---

<sup>15</sup>Laporan harian Ikhwanul Muslimin, edisi 5/10/1947, alih bahasa Zein Hassan. Baca juga, Zein Hassan, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*.



arah persatuan dan peleburan dalam satu persaudaraan Islam yang bertujuan memutuskan rantai-rantai penjajahan asing dan imperialisme.

“Dalam hal ini, Indonesia juga menyokong perjuangan Pakistan sepenuhnya, Indonesia negeri ummat Islam dan akan berjoang dibarisan Kaum Muslimin,” tegas Sjahrir waktu ketika mem-berikan pandangannya mengenai perjuangan kemerdekaan rakyat Pakistan dalam menjawab pertanyaan wartawan Ikh-wanul Muslimin mengenai pergolakan Pakistan.

Ketika menjawab pertanyaan wartawan An-Nida, tanggal 18 November 1947, Sjahrir juga menyatakan bahwa: “Tidak ragu lagi bahwa Ummat Islam dan bangsa Arab mempunyai peranan besar dalam politik dunia, dengan persatuan politik dan persamaan pengertian dalam taktik dan strategi. Yang penting adalah supaya mereka pandai memperankan kekuatan mereka ini, terutama di Timur Tengah, suatu daerah penting yang menjadi rebutan pengaruh dan kekuasaan antara dua blok (Blok Soviet/Komunis dan Blok AS/Kapitalis).”

Sjahrir meyakini bahwa, apabila Dunia Arab pandai mempergunakan kekuatan itu, maka mereka dapat menjadi faktor yang efektif dalam perkembangan situasi dan dalam menciptakan perimbangan kekuatan internasional, terutama di Timur Tengah dan Dunia Islam.<sup>16</sup>

Ketika Sutan Sjahrir singgah lagi di Kairo dalam perjalanan pulang dari DK-PBB New York, ia telah mengadakan pem-bicaraan dengan Mahmud Fahmi Nokrasyi Pasya, Perdana Menteri merangkap Menlu Mesir, membahas hubungan Indo-nesia-Mesir. Dalam pembicaraan itu telah disepakati mening-katkan hubungan diplomasi antara kedua negara itu pada tingkat Kedutaan. Waktu itu tingkat Kedutaan Besar hanya dipunyai oleh negara-negara besar. Persetujuan itu telah disiarkan Kementerian Luar Negeri Mesir pada 19 Nopember 1947, sebagai pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani sebelumnya pada 10 J u n i 1 9 4 7

Pada tanggal 20 Nopember 1947, harian Al-Ikhwanul Muslimin yang diterbitkan organisasi Ikhwanul Muslimin pimpinan Hasan Al-Bana kembali menyiarkan berita sebagai berikut: “Sri Baginda Raja Faruk telah berkenan kemarin, menanda-tangani Dekrit Kerajaan mengenai pembukaan Kedutaan-kedutaan Mesir di Pakistan, India, Indonesia dan Australia, dan pembukaan konsulat di Siprus dan telah terdapat perse-tujuan antara Dr. Sjahrir, mantan Perdana Menteri Indonesia, ketika beliau berada di Kairo dan sebelum meninggalkan kota ini menuju Pakistan.”<sup>17</sup>

Terpesona oleh kepribadian Sjahrir, Utusan Istimewa Liga Arab yang komit terhadap Indonesia, Muhammad Abdulmun'im, mengatakan: “Dr. Sjahrir adalah seorang pemimpin Indonesia terkemuka, meskipun beliau masih muda, yaitu baru berumur tiga-puluh tujuh tahun. Beliau seorang yang cakap dan pandai memberi pengertian, sehingga Lord Killearn, Komisariss Tinggi Inggris di Asia Tenggara, mengakui bahwa ia belum pernah selama pengalamannya di bidang diplomasi menemui seorang diplomat yang demikian kuat argumenasinya dan pandai memberi pengertian, seperti Dr. Sjahrir.”

Jejak-jejak Sjahrir, Haji Agus Salim, dan para pejuang diplomasi Indonesia lainnya di Timur Tengah itu membekaskan makna yang dalam bagi Mesir dan Dunia Arab, terutama dukungan Indonesia di bawah Soekarno-Hatta-Sjahrir bagi Palestina seperti yang diartikulasikan Sutan Sjahrir berikut ini:

“Indonesia menentang pembagian Palestina antara pen-duduk asli Arab dan pendatang Yahudi secara paksa, sebagai disarankan oleh komisi internasional PBB, serta mengecam pendirian komisi itu yang dikatakan tidak berpedoman kepada kenyataan yang hidup di Palestina dan tidak menghiraukan keadilan dan kebenaran Per-soalan Palestina pada dasarnya adalah persoalan kebe-naran, keadilan dan kemerdekaan. Maka oleh karena itu ia menjadi

---

<sup>16</sup>Kesaksian Zein Hassan yang mendengarkan dan mencatat perjumpaan dan pembicaraan Sjahrir dengan para tokoh, pemimpin Arab dan para wartawan di Kairo pada 1947 itu.

<sup>17</sup>Lihat, Zein Hassan, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*.

persoalan Arab dan Kaum Muslimin seluruhnya. Bangsa Indonesia yang sedang memerangi kezaliman dan penjajahan menentang sekuat-kuatnya pembagian Palestina dan berdiri di samping saudara-saudaranya negara-negara Arab dan Ummat Islam dan pecinta-pecinta kebenaran dan keadilan, sampai Palestina mencapai kemerdekaan penuh dan memperoleh hak-haknya seluruhnya.”<sup>18</sup>

Mesir dan Liga Arab memperkuat dukungan bagi kemerdekaan RI dengan lawatan Sjahrir yang mampu meyakinkan betapa pentingnya dukungan Dunia Arab itu. Sejarah mencatat bahwa pengakuan kedaulatan Indonesia pertama kali bukanlah dilakukan oleh negara-negara Barat, apalagi Amerika Serikat yang sering mengklaim dirinya sebagai promotor kebebasan dan hak asasi manusia (HAM). Perjuangan kemerdekaan Indonesia disokong oleh negara-negara muslim di Arab secara heroik tidak lain karena faktor Islam peradaban. Dunia Arab merasakan, betapa kuat kedekatan lahir-batin (ukhuwah Islamiyyah) antara bangsa Indonesia yang tengah memperjuangkan kemerdekaannya dengan bangsa-bangsa Arab.

Di Timur Tengah, Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kedekatan emosional tokoh-tokoh nasional seperti Sutan Sjahrir, M. Natsir, H. Agus Salim dan lain-lain dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam di Mesir seperti Hasan Al Banna dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang juga turut memperjuangkan kemerdekaan bumi-bumi Islam yang lainnya. Kelak dari Mesir, meluaslah dukungan negara-negara Arab lainnya yang tercatat sebagai pemberi pengakuan pertama kepada RI selain Mesir adalah Syria, Iraq, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia dan Afghanistan. Selain negara-negara tersebut Liga Arab (Arab League) juga berperan penting dalam Pengakuan RI. Secara resmi keputusan sidang Dewan Liga Arab tanggal 18 November 1946 menganjurkan kepada semua negara anggota Liga Arab (Arab League) supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Alasan Liga Arab memberikan dukungan kepada Indonesia merdeka didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan dan persamaan nasib.

Dukungan dari Liga Arab dijawab oleh Presiden Soekarno dengan menyatakan bahwa antara negara-negara Arab dan Indonesia sudah lama terjalin hubungan yang kekal “karena di antara kita timbal balik terdapat pertalian agama“. Sementara pernyataan Sutan Sjahrir atas dukungan negara-negara Arab yang diungkapkan di Harian Ikhwanul Muslimin, Mesir:

“Adalah suatu kenyataan adanya kecenderungan mengembang dalam ummat Islam di dunia ke arah persatuan dan peleburan dalam satu persudaraan Islam yang bertujuan memutuskan rantai-rantai penjajahan asing... Indonesia menyokong Pakistan sepenuhnya. Indonesia negeri Islam dan akan berjuang di barisan kaum Muslimin.”<sup>19</sup>

Pengakuan Mesir dan negara-negara Arab tersebut melewati proses yang cukup panjang dan heroik. Begitu informasi proklamasi kemerdekaan RI disebarkan ke seluruh dunia, pemerintah Mesir mengirim langsung konsul Jendralnya di Bombay yang bernama Mohammad Abdul Mun'im ke Yogyakarta (waktu itu Ibukota RI) dengan menembus blokade Belanda untuk menyampaikan dokumen resmi pengakuan Mesir kepada Negara Republik Indonesia. Ini merupakan pertama kali dalam sejarah perutusan suatu negara datang sendiri menyampaikan pengakuan negaranya kepada negara lain yang terkepung dengan mempertaruhkan jiwanya. Ini juga merupakan utusan resmi luar negeri pertama yang mengunjungi ibukota RI.

Pengakuan dari Mesir tersebut kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan Indonesia–Mesir di Kairo. Menjelang penandatanganan perjanjian

---

<sup>18</sup>Lihat terjemahan bebas M. Zein Hassan dari koran Ikhwanul Muslimin, (3/10/1947).

<sup>19</sup>Koran Ikhwanul Muslimin, 5 Oktober 1947.

tersebut, duta besar Belanda di Mesir “menyerbu” masuk ke ruang kerja Perdana Menteri Mesir Nokrasi Pasha untuk mengajukan pro-tes sebelum ditandatangani perjanjian tersebut. Kedatangan Duta besar Belanda bertujuan mengingatkan Mesir tentang hubungan ekonomi Mesir dan Belanda serta janji dukungan Belanda terhadap Mesir dalam masalah Palestina di PBB. Menanggapi protes dan ancaman Belanda tersebut, PM Mesir memberikan jawaban sebagai berikut: “menyesal kami harus menolak protes Tuan, sebab Mesir selaku negara berdaulat dan sebagai negara yang berdasarkan Islam tidak bisa tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini adalah tradisi bangsa Mesir dan tidak dapat diabaikan.” Raja Farouk Mesir juga menyampaikan alasan dukungan Mesir dan Liga Arab kepada Indonesia dengan mengatakan: “karena persaudaraan Islamlah, terutama, kami membantu dan mendorong Liga Arab untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan mengakui kedaulatan negara itu.”

Sjahir di Kairo mendapatkan dukungan besar dari para pejuang, tokoh dan pemimpin Arab yang menginginkan Indo-nesia merdeka dan berdaulat penuh. Dari Kairo, kemudian Sjahir terbang ke Barat menuju AS. Dukungan para tokoh dan pemimpin Mesir, termasuk Ikhwanul Muslimin ini kian memperkuat semangatnya dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, New York, yang ditempuhnya melalui jalan terjal dan berliku.

Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 14 Agustus 1947 di Lake Success, New York, Amerika Serikat, akhirnya berlangsung. Sutan Sjahir, seorang lelaki muda berwajah Melayu, berambut ikal, usianya 38 tahun, tingginya tidak mencapai 1,6 meter, mengurai pandangannya dengan tenang. Dari caranya berbicara, kelihatan ia tak terpancing pernyataan provokatif Eelco R. van Kleffens, salah seorang yang mewakili kubu lawannya (Belanda), yang merupakan seorang pejabat senior kementerian luar negeri Belanda. Ketimbang menyusun argumentasi, Kleffens membeberkan aneka perilaku buruk kalangan “republikan”. “Mana yang Anda percaya, mere-ka atau orang-orang beradab seperti kami,” begitu ia menutup presentasinya, seperti yang terekam dalam dokumen-tasi video Des Alwi.<sup>20</sup>

Sutan Sjahir menjawab dengan tenang, argumentasinya tak beringsut dari satu titik: Belanda telah melanggar Perjanjian Linggarjati. “Saya yakin anggota dewan dapat menilai, apakah tuduhan Belanda tersebut benar atau salah. Namun ada satu fakta yang hendak saya tekankan: pihak Belanda tidak mem-bantah semua fakta yang terungkap pada pernyataan terakhir saya, di mana Belanda mengingkari Perjanjian Linggarjati. Ketimbang membantah pernyataan saya, pihak Belanda justru mengajukan tuduhan yang tak terbukti,” katanya dalam bahasa Inggris yang cukup fasih. Ia bercerita tentang kejayaan Indonesia seribu tahun silam dalam formasi Kerajaan Majapahit, kemudian menampilkan gambaran kontras. “Namun, karena penjajahan Belanda selama tiga setengah abad, bangsa kami mengalami kemunduran total,” ujarnya. Sjahir menepis anggapan bahwa kemerdekaan Indonesia pemberian Jepang, ia meminta bantuan PBB untuk bertindak sebagai penengah dalam konflik Indonesia-Belanda, dan meminta agar PBB mengeluarkan putusan untuk memaksa pasukan Belanda mundur dari daerah republik. Sayang, kedua permintaan itu tidak terpenuhi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Laporan Tempo, “Kemenangan di Lake Success,” Tempo, 09 Maret 2009.

<sup>21</sup> Meski begitu, menurut Charles Wolf, penulis buku *The Indonesian Story: The Birth, Growth, and Structure of the Indonesian*, kemenangan tetap berada di pihak republik muda itu. “Pidato Sjahir menarik, canggih dan efisien,” tulis Wolf. Itulah sebabnya, surat kabar berpengaruh di negeri Abang Sam, *New York Herald Tribune*, pada 15 Agustus 1947 menebalkan pidato Sjahir sebagai “salah satu yang paling menggetarkan di Dewan Keamanan”. Dari situlah dukungan dunia internasional mengalir. Bukan hanya dari para sahabat seperti India, Filipina, Australia, dan Suriah, tapi juga dari negara seperti Rusia dan Polandia. Komisi tiga negara yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat pun dibentuk sebagai mediator konflik Indonesia-Belanda. Yang terpenting, Belanda gagal menerapkan keinginannya melakukan pendekatan unilateral melalui kekuatan bersenjata. Pada 30 Juli 1947, India dan Australia resmi mengajukan surat permintaan agar kasus

Menurut ahli sejarah Rushdy Hoesein, pidato Sjahrir di Dewan Keamanan ini dimungkinkan karena adanya pasal arbitase di dalam Perjanjian Linggarjati itu<sup>22</sup>. Inilah momen yang membuat Indonesia tampil di kancah internasional. Nama Indonesia ber-gema dari markas PBB, di Lake Succes, New York tahun 1947 melalui diplomasi Sutan Sjahrir yang didukung Dunia Arab/ Islam.

Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menye-tujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan.

Dewan Keamanan PBB de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947, Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama Indonesia, dan bukan Netherlands Indies. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, kemu-dian resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 August 1947, resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta kelak resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB selalu menye-butkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai The Indonesian Question.<sup>23</sup>

Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran.

Pada 17 Agustus 1947 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menerima Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), karena berang-gotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indo-nesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.

---

Indonesia dibahas dalam rapat Dewan Keamanan PBB. Meski mendapat tentangan dari Belanda dan trio kolonialis Inggris, Prancis, dan Belgia, permintaan kedua negara itu diterima melalui voting anggota dewan pada 12 Agustus 1947.

<sup>22</sup> Laporan Tempo, "Linggarjati, Sebuah Jalan," Tempo, 09 Maret 2009. Di sekolah-sekolah selama ini cenderung diajarkan, Linggarjati adalah perjanjian yang menguntungkan Belanda. Hasilnya dianggap terlalu kompromistis. Linggarjati memutuskan, wilayah Indonesia secara de facto hanya Jawa dan Sumatera, dan Indonesia kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat yang tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. "Linggarjati terutama dikritik oleh pengikut Tan Malaka, pengikut Bung Tomo, atau tentara, yang menuntut kemerdekaan 100 persen," kata wartawan senior Sabam Siagian. Sabam meli-hat, selama ini ada kesalahan menilai peran Sjahrir dalam Linggarjati.

<sup>23</sup>Lihat, S. Hardjosoediro, Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1987). Lihat juga, M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200— 2004; Salim Said, Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics 1945-49 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991); dan kutipan Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Agresi\\_Militer\\_Belanda\\_I](https://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda_I)

#### IV. Kesimpulan

Nampak bahwa Sutan Sjahrir atau Bung Kecil memiliki noktah ikatan sejarah dengan Timur Tengah, di mana ia memiliki sahabat, jaringan dan simpatisan yang kuat dari kalangan diplomat, pemimpin, pejuang, ulama dan aktivis pergerakan. Dan ini sangat mungkin melatari tempat pernikahannya dengan Poppy Sjahrir di Mesir tahun 1950-an ketika mana Poppy sedang studi pasca sarjana (Master) di London School of Economics dan terbang ke Kairo untuk perkawinan itu, yang dilaksanakan oleh Mufti Al Azhar, Mesir. Soedjatmoko, adik Poppy, mewakili ayahnya Prof Dr Saleh Mangundiningat, datang dari Amerika (USA) ke Kairo, untuk pernikahan itu. Sedangkan Sjahrir bertolak dari Jakarta ke Kairo.

Al Azhar, Kairo dipilih sebagai tempat pernikahan karena ikatan batin antara Sjahrir dan para pemimpin agama di Kairo relatif masih kuat dan terjaga, juga secara geografi Kairo terletak di tengah-tengah di mana Poppy yang masih beada di London dan Sjahrir di Jakarta, lebih mudah menentukan titik temu bagi pelaksanaan pernikahan di Kairo yang berada di tengah-tengah jarak antara keduanya itu, di mana Soedjatmoko yang terbang dari Amerika (AS) sebagai saksi perkawinan tersebut.

Dan setelah pernikahan dilaksanakan, Sjahrir dan Poppy terbang melawat ke Eropa Barat, menjelajah dunia masa lalunya yang menempa keduanya sebagai mahasiswa Hindia-Belanda di negeri Eropa, namun tetap dalam semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ketika menikah dengan Poppy, Sjahrir sudah tidak lagi menjadi perdana menteri, namun tetap berjuang sebagai nasionalis sejati karena Belanda masih menguasai Irian Jaya dan proses dekolonisasi belumlah final sepenuhnya.

Dari noktah-noktah Sjahrir di Timur Tengah, sejarah hubungan Indonesia dan dunia Arab pada dasarnya merupakan mata rantai peradaban Dunia Islam, yang sejujurnya bertitik tolak dari persamaan nasib sebagai bangsa terjajah, yang tali-temali dengan perjuangan bersama, solidaritas antarbangsa dan antar-agama sehingga seyogianya harus terus dikembangkan, dan tidak boleh dilupakan oleh bangsa kita. Sampai kapanpun, kiranya. Apalagi di era globalisasi ini, di mana Dunia Islam masih tertinggal dan menghadapi masalah terorisme, korupsi dan transisi demokrasi, HAM, lingkungan hidup dan seterusnya.

Memasuki lebih 70 tahun kemerdekaan Indonesia, menjadi sangat krusial dan relevan bagi Indonesia untuk terus membina serta meningkatkan hubungan dengan Dunia Islam/Timur Tengah maupun negara-negara Barat, Utara maupun Selatan, yang semakin kompleks masalah dan tantangannya. [\*]

#### References

- A.B Lopian & P.J Droglever, *Menelusuri Jalur Linggarjati* (Jakarta: PT Temprint, 1992).  
Abdurrahman, "Peranan Agus Salim Menjelang dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia (1942-1954)", paper, Program Pasacasarjana pada jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada.  
Charles Wolf, *The Indonesian Story: The Birth, Growth, and Struc-ture of the Indonesian* (New York: The John Day Company, 1948)  
Erni Haryanti Kahfi, *Islam and Nationalism: Agus Salim and Natio-nalist Movement in Indonesia During the Twentieth Century* (Jakarta: Logos, 2001).  
Ide Anak Agung Gde Agung, *Persetujuan Renville: Prolog danEpilog* (Solo: Yayasan Pustaka Nusantara, 1995).  
John D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993)  
Koran Ikhwanul Muslimin, 5 Oktober 1947

Laporan Tempo, “Kemenangan di Lake Success,” Tempo, 09 Maret 2009.  
Laporan Tempo, “Linggarjati, Sebuah Jalan,” Tempo, 09 Maret 2009  
M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200—2004 (Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, 2005).  
Majalah Tempo, 30 September 2001  
Rudolf Mrazek, Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia (Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program, 1994).  
S. Hardjosoediro, Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1987).  
Salim Said, Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics 1945-49 (Singapore: Institute of South-east Asian Studies, 1991)  
Zein Hassan, Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri (Jakarta:Penerbit Bulan Bintang, 1980).